

LINDUNGI LAHAN PRODUKTIF BERALIH FUNGSI, WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Pemkab Bantul Bebaskan Pajak LP2B Mulai Tahun 2026



Hamparan lahan pertanian padi siap panen di Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

KR-Sukro Riyadi.

BANTUL (KR) - Pemerintah Kabupaten Bantul bakal membebaskan pajak khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2025 ini sudah dimulai pendataan di lapangan oleh tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada tahun 2026, program membebaskan pajak LP2B akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Bantul punya komitmen dan tekad, bahwa pembebasan pajak LP2B sebagai salah satu upaya menjaga lahan produktif tidak dialih fungsikan. Selain itu sebagai langkah kongkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul.

"Tahun 2025 ini kita sedang mematangkan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul. Sekarang ini pemerintah daerah sudah membentuk tim yang terdiri dari satu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPK PAD) serta bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul," ujar Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, Selasa (29/4).

Abdul Halim mengungkapkan, nantinya tim tersebut akan diajak untuk melakukan

an pemetaan area LP2B di Kabupaten Bantul. Dengan kerja tim instansi terkait itu sebagai antisipasi jangan sampai terjadi kekeliruan pada saat program pembebasan LP2B sudah dijalankan. "Kami ingin memetakan berapa posisinya LP2B kita. Karena jangan sampai slip pajak PBB-nya itu berupa sawah tetapi kenyataannya sudah menjadi rumah, atau cafe atau kos-kosan atau asra-

ma ini kan namanya negara dirugikan," ujar Abdul Halim.

Dijelaskan, sejauh ini tahapan yang sudah dijalankan ialah pendataan. "Nanti kita data, di tahun 2025 dan sudah proses pendataan untuk program pembebasan pajak PBB Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Artinya pembebasan lahan sawah pertanian berkelanjutan itu mulainya tahun 2026. Bukan tahun ini. Tahun ini baru pemotretan-pemotretan lahan, dan penetapan berapa LP2B nanti yang akan kita bebaskan. Kalau tulisan SPPT masih sawah tapi nyatanya rumah, ya tentu tidak dibebaskan. Dan harus membayar PBB secara normal," ujar Abdul Halim.

Abdul Halim mengungkapkan, mengapa sektor menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul. Bahkan menjadikan pertanian prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul. Baik dalam

rencana pembangunan lima tahunan dimulai 2025 sampai tahun 2030. Dengan demikian, bidang pertanian akan terus dijadikan sasaran pem-

angunan baik jangka pendek dan panjang. "Pertanian punya arti yang sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan, menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Halim.

Oleh karena itu kita Halim, rencana-rencana pembangunan bidang pertanian itu harus maju sesuai perkembangan teknologi. "Mulai dari pembangunan sarana prasarana, terus alat-alat dan mesin pertanian. Karena membangun pertanian sekarang ini sudah saatnya menggunakan alat-alat modern. Karena mesin pertanian semakin canggih seperti mesin penanam padi dan juga mesin untuk panen padi," ujar Abdul Halim disela panen raya padi bersama Bupati Bantul dan Gapoktan Gemah Ripah Kalurahan Pendowoharjo, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pelestarian tradisi budaya.

Selain itu hadirnya alat mesin pertanian karena sudah keterbatasan buruh tani. Sehingga saat ini akhirnya mau tidak mau untuk mengganti jasa tenaga manusia tersebut harus diganti dengan mesin. Selain itu kemudian di dalam mempersiapkan bibit dan pupuk juga penting khususnya pupuk organik. "Oleh karena itu Pak Kepala Dinas Pertanian terus mematangkan rencana membuat instalasi pupuk organik. Pupuk kimia masih dibutuhkan dan digunakan tetapi ini nanti kita turunkan jumlah pupuk kimianya. Yang digunakan oleh petani kedepannya pupuk organik ditingkatkan. Langkah tersebut diterapkan untuk menyelamatkan kegemburan tanah dan unsur-unsur organik untuk mempertahankan kesuburan tanah," jelas Halim. Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo S.P.t M.S.i mengatakan, jika sekarang ini di Kabupaten Bantul mempunyai area LP2B mencapai 12.831 hektare. Artinya lahan yang masuk dalam kategori tersebut dibebaskan dari pajak. Tentu akan semakin memudahkan dalam menjaga agar tetap menjadi lahan produktif. Menurut Joko Waluyo, petanya sudah ada sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2023.

Menurut Joko Waluyo, dengan membebaskan area LP2B tersebut, lahan tidak akan dialih fungsikan selain untuk pertanian. "Program Pak Bupati Halim membebaskan area LP2B di Kabupaten Bantul secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan petani. Karena petani tidak membayar pajak. Tetapi harapan kami, tetap menjadi lahan untuk sektor pertanian. Dan tentunya dengan lahan pertanian yang tidak beralih fungsi itu berkontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bantul," ujar Joko Waluyo.

Joko mengungkapkan, jika LP2B di Kabupaten Bantul dalam luasan besar tersebar di sejumlah kapanewon. Mulai Bambanglipuro, Pandak, Jetis, Kretek dan daerah lainnya. Nantinya DKPP Kabupaten Bantul akan berkolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. "Nanti akan menginventarisir dengan mensinkronkan fakta di lapangan dengan peta sama tidak. Jangan sampai sudah ada rumahnya tetapi masuk LP2B. "Program ini cukup penting sebagai upaya untuk mengabdikan lahan produktif dan mendukung program ketahanan pangan" ujar Joko. (Roy)



H ABDUL HALIM MUSLIH
Bupati Bantul

H ARIS SUHARYANTA S.Sos, M.M.
Wakil Bupati Bantul